

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masa ke masa hingga saat ini. Perubahan yang dihasilkan berupa meningkatnya kualitas masyarakat, sehingga pembangunan merupakan wadah dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pembangunan dianggap penting bagi sebuah negara untuk mengurangi ketimpangan, namun permasalahan inti dari pembangunan adalah adanya kerangka permasalahan pembangunan fasilitas infrastruktur yang belum terbentuk, ketimpangan ekonomi karena berbagai alasan hal ini menjadikan adanya tingkat ketidaksetaraan yang tinggi terhadap sebuah negara. Termasuk Indonesia dimana negara yang memiliki kepulauan memberikan tantangan sendiri dalam konstruksi pembangunan.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan wilayah salah satunya keterbatasan biaya tantangan letak dan kontur geografis dengan akses dan ketersediaan infrastruktur, serta rendahnya sumber daya manusia dan masalah distribusi keuangan fiskal berkontribusi membengkaknya biaya konstruksi di Indonesia. Perkembangan sektor konstruksi akan mendukung terciptanya sarana prasarana sosial dan ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. (KPU & BPS, 2021)

Salah satu indikator terpenting dalam pembangunan adalah sektor konstruksi. Dimana mengingat sektor konstruksi merupakan produk akhir berupa sarana dan prasarana yang baik yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sektor konstruksi memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional dimana pada tahun 2018 indeks kemahalan konstruksi memberikan kontribusi sebesar 6,69 % dari sisi lapangan pekerjaan juga sektor konstruksi mampu menyerap produktivitas tenaga kerja hal itu terjadi karena dijalankannya proyek-proyek infrastruktur yang menyerap tenaga kerja harian lepas maupun tenaga kerja ahli konstruksi. Hal ini mendorong pertumbuhan IKK dimana artinya terjadi peningkatan aktivitas konstruksi sehingga adanya peningkatan permintaan akan bahan bangunan, peralatan, tenaga kerja konstruksi dan pendapatan. Kenaikan ini akan mendorong kenaikan harga bahan bangunan dan biaya tenaga kerja yang tercermin dalam Indeks Kemahalan konstruksi. (Karya & Sipil, 2017)

Sektor konstruksi memegang peranan penting dan berperan dalam suatu perekonomian, sebagian karena outputnya besar dan oleh karena itu, Hal ini merupakan bagian terpenting dari perekonomian karena dapat menyediakan banyak lapangan kerja bagi perekonomian yang sehat. Oleh karena itu, merupakan kebijakan yang baik untuk memperluas konstruksi industri bagi negara-negara berkembang. Namun masalahnya utamanya adalah dinegara berkembang adalah kurangnya modal dan keterampilan tenaga kerja, yang merupakan masukan penting untuk mengembangkan industri dan perekonomian daerah (Xu et al., 2020)

Namun pertumbuhan pada Peningkatan Indeks kemahalan Konstruksi yang lebih dominan adalah efisiensi dalam manajemen proyek konstruksi, regulasi pemerintah dan ketersediaan pasokan sumber daya yang mempengaruhi tingkat indeks kemahalan konstruksi. Industri konstruksi sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang terampil pekerja dan mendukung stabilitas perekonomian. Namun, estimasi biaya yang akurat untuk proyek konstruksi di negara-negara berkembang merupakan tantangan karena ketidakpastian yang terkait dengan durasi proyek, pasokan material, dan perekonomian secara keseluruhan.(Aslam et al., 2023)

Sri Rosmawati, (2017) Keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan memberikan kelancaran bagi mobilisasi kebutuhan masyarakat dimana hal ini sangat diharapkan. Dengan infrastruktur yang memadai kesulitan dalam menjangkau suatu daerah menjadi berkurang. Tingkat Kemahalan Konstruksi ikut diperhitungkan pada Kebutuhan Fiskal karena mencerminkan tingkat harga konstruksi yang dibutuhkan dalam menyediakan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dipandang perlu karena keadaan dan tingkat kesulitan geografis disetiap daerah berbeda-beda. Namun demikian ternyata tidak semua kabupaten/kota dengan angka IKK yang tinggi merupakan wilayah yang secara geografis sulit untuk dijangkau.

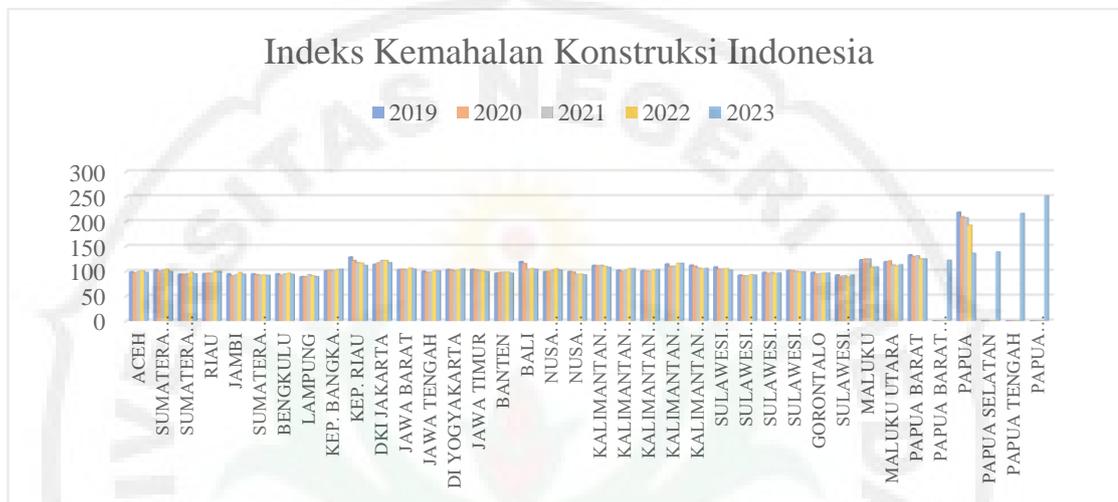
Dalam rangka mendukung semua keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan otonomi daerah yang ditujukan agar pembangunan dapat dirasakan merata dan adil di seluruh wilayah. Kebijakan otonomi daerah (Otonomi Daerah) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk

mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dapat mempercepat pembangunan daerah daerah yang masih tertinggal, baik dari sisi kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alamnya.

Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang penetapan kebijakan otonomi daerah dipandang dalam perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan dan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing. Untuk memenuhi perkembangan keadaan dan kenegaraan, undang-undang tentang pemerintahan daerah ini kembali disempurnakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (UU Republik Indonesia, 2014).

Industri konstruksi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sifat industri yang beragam memungkinkannya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan material secara efektif: memanfaatkan keahlian dari berbagai pihak pemangku kepentingan konstruksi dan juga konsumen utama produk dari sektor manufaktur (Abubakar et al., 2018).

**Grafik 1.1 Indeks Kemahalan Konstruksi di Provinsi Indonesia
Periode 2019-2023**



Sumber : BPS Indonesia 2019-2023

Indeks kemahalan konstruksi di 38 Provinsi Indonesia dapat dilihat dari grafik 1.1 dimana angka indeks kemahalan konstruksi di Indonesia mengalami fluktuasi (naik turun). Provinsi yang memiliki angka indeks kemahalan konstruksi tertinggi setiap tahunnya secara berturut-turut pada tahun 2019-2023 adalah Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah dan Papua sama-sama mencapai angka IKK diatas 200 atau melebihi kota acuan yaitu Semarang. Ini terjadi karena topografi dari daerah ini sangat sulit dan terisolasi membuat transportasi barang dan bahan bangunan lebih sulit dan mahal serta adanya keterbatasan infrastruktur dan transportasi yang menyebabkan biaya logistik tinggi. Tidak hanya dilihat dari kondisi geografis juga dilihat dari keterbatasan tenaga kerja serta upah yang tinggi.

Dan provinsi yang memiliki angka indeks kemahalan konstruksi (ikk) terendah yaitu Lampung, Sulawesi Tengah dengan angka rata-rata 80-90% dan jika dilihat Sumatera Utara berada pada urutan ke 21 daerah yang memiliki IKK rendah.

Hal ini juga terjadi beberapa daerah memiliki akses yang lebih mudah seperti bahan bangunan dan tenaga kerja yang terampil hal ini mempengaruhi dalam mengurangi biaya konstruksi. Hal ini disebabkan karena Indeks Biaya Konstruksi (IKK) adalah suatu angka indeks yang mencerminkan perbandingan tingkat harga di suatu wilayah atau Provinsi dengan wilayah atau Provinsi lainnya (Muda & Kholis, 2014)

**Grafik 1.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Sumatera Utara
Periode 2019-2023**



Sumber : BPS Sumatera Utara

Indeks kemahalan konstruksi Kab Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 mengalami naik turun yang tidak menentu (fluktuasi) dapat dilihat dari table 1.2 daerah yang memiliki indek kemahalan tertinggi di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 adalah Nias Selatan 114,34%, Nias 114,17%, Nias Barat 112,36%, Gunung Sitoli 110,66%, Sibolga 109,58% dan Dairi 107,76% dimana angka ini berada diatas 100 (kota acuan) sedangkan indeks kemahalan terendah pada tahun 2019 di kabupaten/kota Sumatera Utara adalah Pematang Siantar dengan nilai IKK 86,51% pada tahun 2023 Nias Selatan yang mengalami kenaikan

tertinggi pada Indeks kemahalan konstruksi dengan mencapai nilai 111.38% dan yang terendah dialami oleh Batubara dengan nilai 90,52%.

Faktor yang menyebabkan tingginya angka Indeks kemahalan konstruksi ini yaitu bahan- bahan dan alat-alat konstruksi di Kabupaten/kota Gunung sitoli dan Nias memiliki harga yang paling mahal dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh kapasitas fiskal daerah yang cukup baik hal ini disebabkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dimana pemerintah daerah lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik.

Begitu juga sebaliknya apabila nilai IKK suatu daerah dibawah kota acuan atau rendah ini karena memiliki kapasitas fiskal yang cenderung lebih rendah dan dapat mempengaruhi serta membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai proyek konstruksi di daerah tersebut sehingga terjadi penundaan dan pengurangan dalam pembangunan infrastruktur yang pada umumnya meningkatkan biaya konstruksi secara keseluruhan sehingga terjadi ketimpangan dalam distribusi penerimaan dana pembangunan berkelanjutan untuk penuhi kebutuhan fiskal dari daerah itu sendiri. (Imanda Fradiyan Akbar, 2023)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan pencerminan dari perkembangan harga dan tingkat kemahalan konstruksi periode tertentu terhadap tahun dasar suatu Kabupaten/Kota. IKK juga dapat digunakan sebagai standarisasi harga barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan di bidang konstruksi, untuk melihat kewajaran dari anggaran proyek. Provinsi Sumatera Utara termasuk salah

satu provinsi di Pulau Sumatera yang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal anggaran. Oleh karena itu, rumusan persoalan di Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi dua bidang, yaitu rumusan persoalan untuk menentukan prioritas dan tujuan pembangunan daerah.

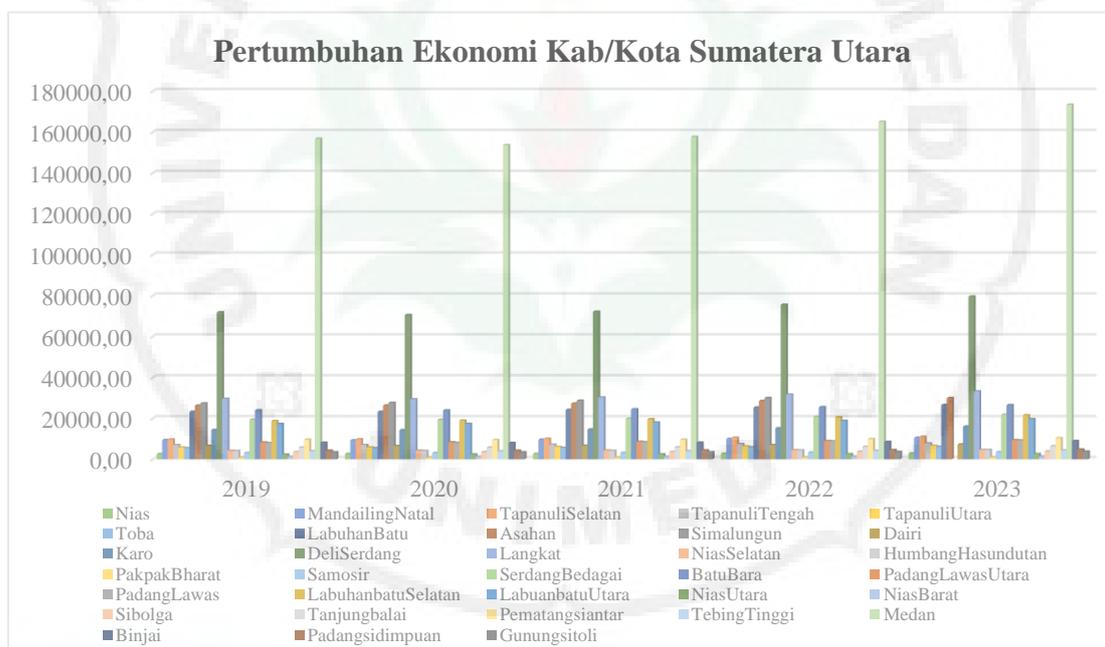
Pada tahun 2019 sektor konstruksi di Sumatera Utara memberikan kontribusi 14,19% terhadap PDRB dimana hal ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang termasuk ekonomi, sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. nilai IKK di Sumatera Utara sendiri tercatat sebesar 102,79% angka ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Sumatera Utara -0,02 lebih rendah dibandingkan dari kota acuan yaitu Kota Semarang (Badan Pusat Statistik sumut, 2020). Hal ini diduga karena sebagian barang konstruksi terutama barang dan materia berasal dari daerah setempat serta penentuan harga bahan bangunan dan harga satuan upah tiap-tiap daerah berbeda yang ditinjau dari lokasi, diiringi oleh sumber daya bahan dan manusia serta transportasi yang berbeda di tiap daerah (Putri et al., 2012).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan konstruksi sebagai suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa berupa bangunan pada tempat kedudukannya, baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sehingga indeks kemahalan konstruksi memiliki hubungan yang signifikan Kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Naik turunnya angka indeks kemahalan konstruksi disebabkan beberapa faktor salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah itu

sendiri. Semakin rendahnya nilai indeks kemahalan konstruksi maka kemungkinan akan menunjukkan semakin meratanya infrastruktur. Salah satu indikator untuk melihat bagaimana pembangunan suatu wilayah terpenuhi adalah dengan melihat tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Di Provinsi Sumatera Utara Pertumbuhan Ekonomi seperti gambar berikut.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2019-2023



Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkembangan nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota Sumatera dapat dilihat pada grafik 1.3 menunjukkan adanya fluktuasi (naik turun) pada nilai realisasi pertumbuhan ekonomi di 33 kabupaten/kota Sumatera Utara dari Tahun 2019-2023. Medan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai pertumbuhan paling tinggi, dimana dengan nilai PDRB HK 2019 Rp.992,661,246. Dan mengalami Penurunan di Tahun 2020 dengan jumlah Rp.308,278,278 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan jumlah Rp.574,604,617 disusul dengan kenaikan tahun 2023.

Rp.2,442,943,494. Disusun dengan Deli Serdang Tahun 2019 dengan Nilai Rp.703,280,071 dan Simalungun Rp.405,283,314.

Adapun daerah yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah 2019 antara lain adalah Pakpak Bharat dengan Nilai Rp.145,937,022, Nias Rp. 180,910,491, Samosir Rp. 164,093,834 dan yang terakhir adalah Sibolga dengan nilai Rp. . 81,569,259 namun pada Tahun 2023 sibolga mengalami kenaikan Rp. 88,828,313 serta daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah 2023 yaitu pada daerah Labuhanbatu Utara Rp. 77,047,248 dan Tanjung Balai Rp.80,724,397. Hal ini juga ditandai dengan Nilai IKK rendah yang berada pada Kab/Kota Nias Selatan, Nias, dan Sibolga hal ini disebabkan kurangnya diversifikasi sektor ekonomi di daerah ini sehingga membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga serta permintaan global dan ini juga disebabkan karena regulasi pemerintah yang buruk sehingga membatasi dan menghambat perkembangan ekonomi melalui pengadaan infrastruktur yang memadai dan menunjang kualitas hidup.

PDRB HK digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada setiap kategori dari tahun ke tahun. Menurut Malik et al., (2020) mengatakan Bervariasinya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Sumatera menunjukkan kerjasama antar kab/kota belum optimal. Dimana pentingnya kerjasama ekonomi antar provinsi bisa mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Membangun ekonomi yang sedang terpuruk akibat adanya pandemic Covid 19 sangat dibutuhkan sinergi antar wilayah. Kerjasama antar wilayah membutuhkan strategi yang tepat dengan memperhatikan kelemahan dan kekuatan masing-masing wilayah.

Konstruksi ini sendiri memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap daya saing dan kemakmuran perekonomian suatu daerah dimana Infrastruktur yang modern dan efisien merupakan pendorong utama produktivitas, dan industri konstruksi mempunyai peran besar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata. Faktor –faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dikelompokkan dari sisi penawaran, seperti kemajuan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan dari sisi permintaan, seperti peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat (Latuheru & Gobay, 2024)

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan didukung oleh dengan salah satu agenda prioritas pemerintah yang dimana membangun infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas masyarakat sehingga dapat mengubah Indonesia menjadi negara produktif sekaligus meningkatkan daya saing negara (Waryanto, 2017).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah sebuah bisnis dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan masyarakat suatu daerah mempunyai tingkat kesejahteraan hidup dan perekonomian yang lebih baik. Dalam mencapai pembangunan ekonomi, ada tiga indikator makro yang berfungsi sebagai ukuran pembangunan kemajuan. Ketiga indikator tersebut adalah tingkat pertumbuhan, lapangan kerja dan stabilitas harga (Mankiw Gregory, 2006). Pertumbuhan

ekonomi terlihat melalui peningkatan output dari waktu ke waktu merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. (Handriyani, 2018).

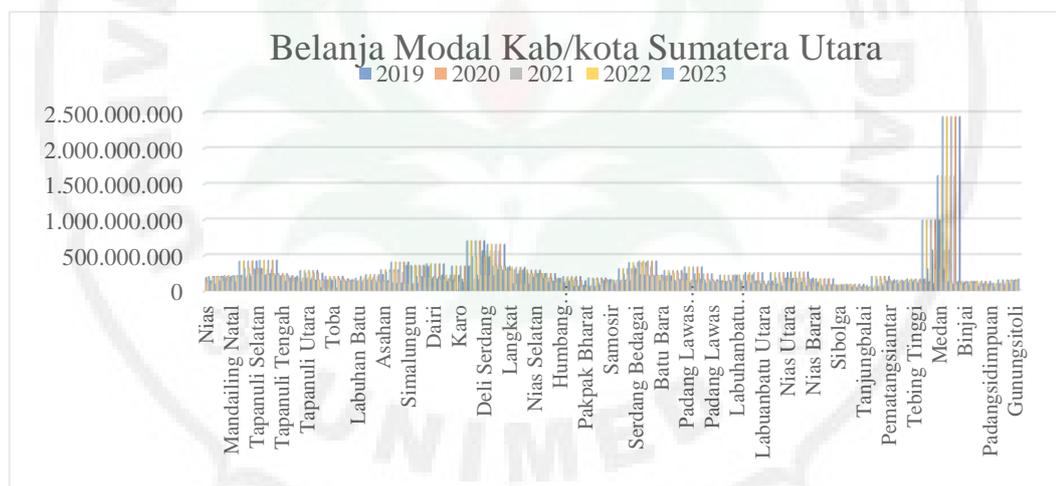
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pembangunan infrastruktur sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah, prasarana infrastruktur tidak hanya digunakan oleh pihak rumah tangga tetapi juga digunakan oleh pihak swasta, bahkan pemerintah.

Oleh karena itu, pentingnya infrastruktur diharapkan mampu membawa kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien, Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dimana apabila semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka Indeks kemahalan Konstruksi lebih rendah dan jumlah bangunan meningkat, sehingga penerimaan pemerintah juga semakin meningkat. Sehingga pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastuktur dan pengadaan aset (Tarmizi et al., 2017).

Hal ini mendukung Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan

dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik (Winda, 2020). Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap PDB nasional melalui belanja modal. Di provinsi Sumatera Utara Belanja Modal seperti pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.4 Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Sumatera Utara

Dari gambar grafik 1.4 belanja modal kabupaten/kota Sumatera Utara dapat diketahui bahwasanya belanja modal diterendah pada tahun 2019 adalah Kota Sibolga dengan jumlah Rp. 81,569,259 diikuti dengan Tanjung Balai dengan Jumlah Rp. 96,299,502 dan tertinggi pada tahun 2019 yaitu Medan dengan jumlah Rp. 992,661,246 dan Deli Serdang Rp. 703,280,071. Belanja modal Sumatera Utara masih sangat rendah masing-masing sebesar 1,4% dan 0,4% pada daerah kecil.

Secara umum hal ini disebabkan realisasi belanja modal hanya dimanfaatkan sekitar 10-30 % dari total penerimaan belanja daerah, bahkan dalam

rentang 5 tahun terakhir masih sebagian kecil total daerah yang bisa memanfaatkan rasio belanja modal diatas 30 % berdasarkan ketentuan Kemendagri. dan hal ini disebabkan dengan komitmen pemerintah yang memfokuskan pembangunan di bidang infrastruktur. Terdapat beberapa proyek infrastruktur berskala besar di Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2018 Belanja modal mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 realisasi APBD sumatera utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh naiknya juga realisasi pendapatan daerah melalui penerimaan. Realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 12,02% namun terjadi penurunan jumlah realisasi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah pada Triwulan III tahun 2019. Sedangkan untuk belanja bunga, bantuan sosial, dan bantuan keuangan mengalami peningkatan realisasi pada Triwulan III tahun 2019. Realisasi tertinggi pembentukan aset adalah belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 45,11%. Penyerapan belanja modal yang masih rendah disebabkan beberapa proyek baru dalam tahap awal pekerjaan dan sebagian lagi masih dalam tahapan proses lelang pengadaan barang dan jasa terutama pengadaan konstruksi melalui lelang secara elektronik.

Pada tahun 2023 Realisasi belanja Modal sumatera utara mengalami pertumbuhan yang positif. Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen dengan realisasi mencapai Rp10.305,91 miliar. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan kontributor terbesar realisasi belanja modal yang mencapai Rp5.081,28 miliar atau 49,30 persen berkontribusi dari total belanja modal. Dengan peningkatan realisasi belanja modal yang positif pemerintah melakukan prioritas pada pembangunan infrastuktur yang didukung oleh sektor konstruksi dimana

program ini diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kab/Kota Sumatera Utara.

Belanja modal untuk fasilitas infrastruktur memiliki peran besar dalam bentuk mendorong perekonomian. Belanja modal memegang peranan penting karena memiliki masa manfaat yang panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal didasarkan pada kebutuhan infrastruktur daerah, baik untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas masyarakat.

Menurut (Rostow W.W, 1991) peralihan dari keterbelakangan ke pembangunan dapat digambarkan dalam suatu rangkaian yang menghubungkan perkembangan belanja pemerintah dengan tahapannya, pembangunan ekonomi membedakan proses perencanaan awal, menengah, dan lanjutan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, persentase total investasi pemerintah cukup baik investasi. Karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan infrastruktur, bangunan, transportasi, dan layanan publik lain sebagainya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja modal, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian

karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian(Putro, 2010) .

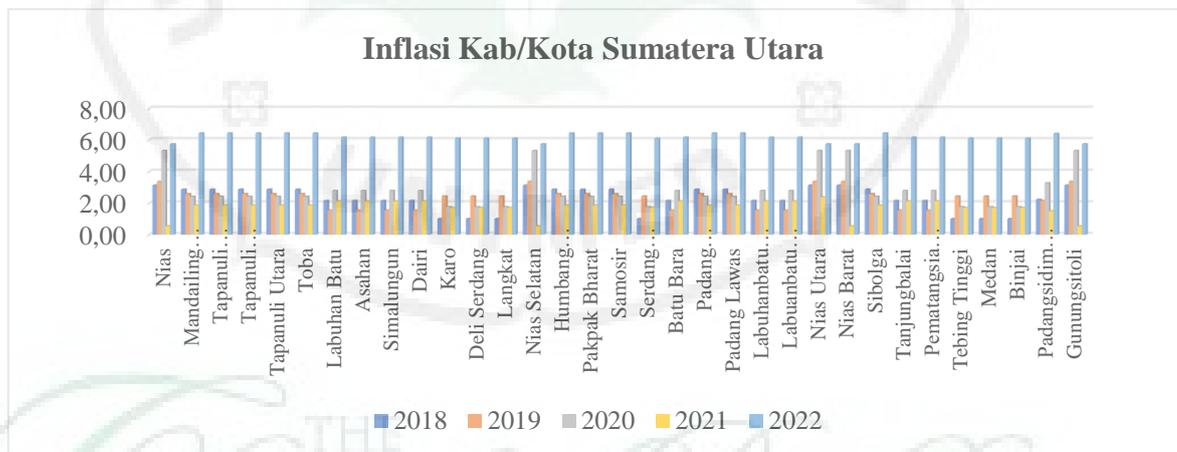
Menurut Nugroho, (2010) dalam (Saragih, 2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program– program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Priyo Hadi Adi, (2006) Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya belanja pembangunan daerah hal ini sependapat dengan kuncoro yang mengemukakan bahwa pembangunan sarana dan prasara daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri sehingga adanya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk terjadi perbaikan kesejahteraan. Peningkatan pelayanan sektor public secara berkelanjutan adalah syarat fundamental dalam pengadaan modal pembangunan yang seimbang sehingga dengan ditambahnya infrastuktur dapat melihat cakupan geografis suatu daerah dan diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dalam merangsang pendapatan penduduk yang bersangkutan seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita (Harianto et al., n.d.)

Tingkat ketersediaan infrastuktur melalui belanja modal adalah landasan terpenting dalam menentuka perluasan pembangunan, dimana infrastuktur

merupakan *overhead capital* atau barang modal yang menjadi dasar keperluan masyarakat secara tidak langsung sehingga menghasilkan dan meningkatkan produksi. Oleh karena itu diperlukan anggaran untuk mendukung pembangunan yang dikeluarkan oleh APBD. oleh karena itu adanya efisiensi biaya, Namun harga cenderung tidak stabil atau mengalami fluktuasi dimana hal itu mempengaruhi analisis kinerja konstruksi. Fluktuasi biaya terjadi dikarenakan adanya inflasi dimana inflasi dapat mempengaruhi biaya, harga material serta upah dari pekerja sektor konstruksi (Siregar Eddy, 2021). Berikut Inflasi di Sumatera Utara dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 1.5 Inflasi Periode 2019-2023



Sumber : BPS Sumatera Utara

Dari fenomena grafik 1.5 terlihat bahwa tingkat inflasi yang paling tinggi berada di sibolga pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,80%, dan Gunung Sitoli 2,58% serta inflasi terendah yaitu Pematang Siantar 1,54% dan Medan yaitu sebesar 2,19%. Nilai inflasi kota Medan pada tahun 2019 sebesar 2,43% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,76%. dan pada tahun 2021 mengalami penurunan

menjadi 1.70% dan 2022 mengalami kenaikan drastis menjadi 6,10%. Di saat tingkat inflasi di medan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 ke tahun 2023, angka indeks kemahalan konstruksi juga mengalami kenaikan dan penurunan yang tak pasti. Berdasarkan data tersebut sesuai dengan teori Keynes dimana inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga bahan baku, upah, tenaga kerja, dan komponen konstruksi lainnya yang kemudian tercermin dalam kenaikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Industri konstruksi di Sumatera Utara terus memperkirakan biaya pertimbangan dalam siklus hidup proyek konstruksi yang berperan penting dalam mendorong keberhasilan proyek. Oleh karena itu, keakuratan estimasi sangat penting dalam penyusunan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut perspektif para pemangku kepentingan. Namun, estimasi biaya konstruksi merupakan permasalahan utama proyek konstruksi. Hal ini disebabkan tingginya ketidakpastian perubahan biaya konstruksi secara dinamis. Biaya konstruksi di Sumatera Utara dapat berfluktuasi karena inflasi dapat menimbulkan permasalahan pada proyek konstruksi khususnya mega proyek. Untuk mengatasi hal ini masalah ini, kontraktor dimanfaatkan untuk memperkirakan harga material di masa depan dan memberikan perkiraan yang lebih akurat perkiraan biaya proyek. Namun, memprediksi harga di masa depan adalah hal yang rumit dan melibatkan banyak hal banyak variabel yang mungkin menjadi tantangan untuk diatasi.

Apabila inflasi tidak dapat dikontrol dan berada pada titik tertinggi, perusahaan konstruksi akan kesulitan untuk membeli barang baku karena harganya yang tinggi. Dengan adanya inflasi yang baik, perusahaan dapat mempertahankan

profitabilitasnya. Biaya konstruksi akan meningkat karena harga yang tinggi, dan kenaikan ini akan berdampak pada kenaikan harga kontrak. Alokasi biaya konstruksi mencakup biaya langsung, seperti peralatan, tenaga kerja, dan material, serta biaya tak langsung. Karena keterkaitan dan efek multiplier yang tinggi, subsektor konstruksi memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Efek multiplikasi adalah ketika pengeluaran nasional naik atau turun dan konsumsi suatu wilayah meningkat atau turun di tingkat nasional (Zulfikar et al., 2020)

Inflasi menjadi permasalahan kronis yang dampaknya merasuk ke dalam perekonomian seluruh industri konstruksi. Pemerintah dan investor tidak hanya membayar kenaikan biaya fasilitas dan modal tetapi juga biaya premi pada harga konstruksi karena ketidakpastian inflasi dan dampak sampingnya. Inflasi bersifat persisten kenaikan tingkat harga konsumen atau penurunan daya beli uang yang terus-menerus. dapat berdampak negatif terhadap kelayakan finansial proyek. Setiap industri terkena dampak positif atau negatif dari inflasi. Inflasi juga berdampak pada industri konstruksi, dimana banyak penelitian telah menyoroti peran inflasi dalam biaya proyek. Karena inflasi, harga bahan bangunan, upah tenaga kerja dan tarif sewa mesin berubah setiap tahun, mengakibatkan anggaran awal proyek menyimpang dari anggaran akhir (Tadesse Borku & Tarku Yeniale, 2022).

Tingkat inflasi tidak dapat dihindari dalam dunia perekonomian dan mempengaruhi perekonomian secara negatif atau positif. Dampak inflasi juga terlihat pada variabel ekonomi lainnya, termasuk harga bahan material. Dengan mempertimbangkan pandangan ini, konstruksi dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang melintasi ketiga sektor ekonomi tersebut. Namun tingkat inflasi menjadi

tekanan besar karena berdampak negatif pada industri konstruksi . Oleh karena itu, pengaruh tingkat inflasi pada industri konstruksi tidak dapat diabaikan. Di sebuah anggaran proyek konstruksi, 35% hingga 60% biayanya adalah bahan bangunan , yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi setiap tahunnya (M. A. Musarat et al., 2021).

Tingkat inflasi terus berlanjut mempengaruhi sektor konstruksi dan pada awalnya diabaikan, dimana biaya proyek berlebihan yang meningkat karena efek tingkat inflasi. Sebaliknya, logistik yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan biaya konstruksi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Chandra & Wirantono, 1991) Yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negative terhadap inflasi dikarenakan sektor konstruksi.

Hal ini dikarenakan adanya biaya-biaya yang berubah tiap tahun sesuai dengan peningkatan dan penurunan inflasi . Dalam industri konstruksi yang sangat dipengaruhi oleh inflasi adalah biaya pekerja, biaya bahan, biaya peralatan, suku bunga, biaya overhead, pajak dan keuntungan yang kenaikan biaya akibat inflasi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa terjadi dibalik hanya jika parameter lain dipantau proyek konstruksi dapat menjamin keekonomian dan efisiensi.

Anggaran merupakan parameter utama dalam setiap proyek konstruksi. Di dalam proyek yang durasinya panjang, wajar jika anggarannya banyak direvisi. Salah satu penyebabnya adalah bahan bangunan, biaya tenaga kerja dan mesin meningkat setiap tahun karena inflasi. Inflasi memainkan peran penting dalam kenaikan harga bahan, tenaga kerja, dan mesin, yang mengakibatkan penyimpangan awal dan biaya akhir proyek. Biaya konstruksi tidak stabil, dan harga bahan dan

biaya lainnya terus berfluktuasi, menciptakan volatilitas pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi namun pasar tenaga kerja dan indeks harga konsumen juga terkena dampaknya oleh inflasi. Biaya tenaga kerja dan material juga mempengaruhi inflasi, namun ada perubahan besar yang disebabkan oleh faktor kontraktor dan pemasok. margin. Inflasi industri konstruksi berbeda-beda.

Industri konstruksi itu penting bagi negara mana pun untuk membangun perekonomiannya, karena terdapat investasi yang sangat besar terlibat. Namun inflasi menjadi masalah besar dan memberikan dampak negatif pada industri konstruksi. Inflasi menyebabkan terjadinya penundaan proyek untuk mencegah pembengkakan biaya, yang terutama disebabkan oleh inflasi. Dampak bahan bangunan 35% hingga 60% dari keseluruhan biaya konstruksi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas,, maka peneliti ingin melihat bagaimana variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan Inflasi berpengaruh terhadap indek kemahalan konstrksi. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Inflasi Terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kab. Sumatera Utara”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, peneliti memaparkan beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Sumatera Utara diantaranya :

1. Angka indeks kemahalan kosntruksi mengalami fluktuasi sehingga adanya ketimpangan dalam pengelolaan proyek konstruksi yang tidak efisien.
2. Terdapat beberapa Kab/Kota di Sumatera Utara yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang masih cukup rendah.
3. Masih terdapat ketimpangan APBD dalam pengelolaan dan penggunaan dana belanja modal yang tidak optimal Kab/Kota provinsi Sumatera Utara.
4. Inflasi mempengaruhi kenaikan biaya dari sektor konstruksi dimana hal itu merupakan ceminan dari Indeks Kemahalan Konstruksi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Indeks Kemahalan Konstruksi serta variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Inflasi di Kab/Kota Sumatera Utara tahun 2018- 2022.
2. Data variabel yang digunakan merupakan data 33 Kab/Kota Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Inflasi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kab. Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Inflasi terhadap Indeks Kemahalan Konstruksi di Kab. Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu memperluas wawasan pengetahuan serta sebagai landasan bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh indeks kemahalan konstruksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya konstruksi di wilayah tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi dan pembangunan di daerah yang menjadi fokus penelitian.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan efisien serta membantu pemerintah melihat peluang ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat dalam mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian.